



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH BALI  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM**  
Jalan Serma Natih No.2 Amlapura 80811  
Telepon : (0363) 21144

Laman : <https://lapaskarangsem.kemenkumham.go.id> Surel : [lapaskarangsem@gmail.com](mailto:lapaskarangsem@gmail.com)

## **LAPORAN TRIWULAN II PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB KARANGASEM TAHUN 2023**

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (Organisasi), Ketatalaksanaan (Business Process) dan Sumber daya manusia aparatur. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi yang masih berlangsung pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan, Tata Laksana atau Business Process, Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, Perubahan Pola Pikir (Mind Set) dan Budaya Kerja (Culture Set). Untuk meningkatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam pencapaian dan implementasi reformasi birokrasi Kementerian yang baik perlu ada komunikasi tentang Reformasi Birokrasi tidak hanya di jajaran Pusat namun menyeluruh sampai Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengupayakan perubahan untuk memberikan dampak pada penurunan praktek – praktek KKN, pelaksanaan anggaran yang lebih baik, manfaat program-program bagi masyarakat meningkat, kualitas kebijakan dan pelayanan publik meningkat, produktifitas aparatur meningkat, kesejahteraan pegawai meningkat dan hasil-hasil pembangunan secara nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Mengingat Reformasi Birokrasi menjadi suatu kebutuhan utama atas tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar kinerja birokrasi dan aparatur menjadi lebih baik dan lebih berkualitas. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan dinilai pada

dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan manfaatnya secara internal oleh organisasi maupun eksternal yaitu masyarakat yang dilayani untuk dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.

## **B. Tujuan**

1. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan reformasi birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
2. Menilai pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
3. Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

## **C. Ruang Lingkup**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem

## BAB II

### PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

#### A. Gambaran Umum

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah proses perubahan yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dan profesionalisme SDM Aparatur. Proses ini dapat dipandang sebagai perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi yang diinginkan dalam lingkup Reformasi Birokrasi. Implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM berpedoman pada Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-19.0T.03.01 Tahun 2020. Proses Implementasi Reformasi Birokrasi selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM berupaya keras guna mewujudkan pelayanan prima melalui perbaikan kinerja dan pelayanan kepada publik dalam bidang Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelayan masyarakat harus mampu melakukan perubahan yang signifikan pada elemen-elemen birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menghadapi tantangan terkait pelayanan yang belum maksimal, masih adanya pungutan liar dan praktik KKN, disiplin dan mentalitas birokrat yang masih dibawah standar serta orientasi program dan kegiatan yang tidak berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu banyak hal yang masih harus dioptimalkan dalam melaksanakan prioritas-prioritas yang diemban Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi Reformasi Birokrasi yaitu melalui pemahaman baik berupa sosialisasi dan internalisasi secara berkesinambungan dan pemberian modul Reformasi Birokrasi kepada seluruh jajaran di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sehingga diharapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dapat merubah mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja sebagai upaya dalam rangka mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN

#### B. Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023

Rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023 dilaksanakan sesuai dengan surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : SEK.1.OT.03.03-348 Tanggal 13 Juni 2023 perihal Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023.

## BAB III

### CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2023

#### A. Area Manajemen Perubahan

##### 1. Capaian

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja di dalamnya menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dimana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- a. Telah melaksanakan pencaangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. Telah melaksanakan monitoring terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

##### 2. Kendala/Hambatan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Birokrasi Manajemen Perubahan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

##### 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Manajemen Perubahan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

#### B. Area Penataan Tatalaksana

##### 1. Capaian

Penataan tatalaksana bertujuan untuk untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing instansi pemerintah dimana Telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Telah dibentuk Tim Pengelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor W.20.PAS.PAS.6-05.TI.06.02 TAHUN 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor : W.20.PAS.PAS.6-02.TI.06.02 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023;

- b. Telah dibentuk Tim Pengawas Kearsipan sesuai surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor W20.PAS.EKA.OT.01.03-10 Tahun 2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Tim Pengawasan Kearsipan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
- c. Telah dibentuk Tim Alih Media Arsip sesuai surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor W.20.PAS.PAS.6-01.TI.03.03 TAHUN 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Tim Alih Media Arsip Vital dan Arsip Permanen di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- d. Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas.

## 2. Kendala/Hambatan

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Birokrasi Penataan Tatalaksana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

## 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Penataan Tatalaksana Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Melakukan pengawasan kearsipan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem.

## C. Area Penataan Sistem Manajemen SDM

### 1. Capaian

Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan dimana Telah dilakukan sebagai berikut :

- a. Telah dibuat laporan pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di Lapas Kelas IIB Karangasem;
- b. Telah dilakukan pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham;
- c. Telah dilakukan pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM;
- d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai;
- e. Telah dilakukan internalisasi dan publikasi Kode Etik Pegawai.

## 2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Sistem Manajemen SDM pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

## 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Sistem Manajemen SDM Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja;
- b. Melaksanakan *public campaign* penegakan disiplin untuk internal pegawai.

## D. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

### 1. Capaian

Penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem telah dilaksanakan :

- a. Telah dilakukan *coaching* dan mentoring terkait capaian kinerja secara berkala;
- b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik;
- c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja dan target kinerja;
- d. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023;
- e. Telah dilakukan publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham;
- f. Telah dilakukan penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN;
- g. Telah dilakukan pengawasan dan pengendalian BMN;
- h. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 *unaudited*;
- i. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 *audited*;
- j. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.

### 2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Penguatan Akuntabilitas Kinerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

### 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Penguatan Akuntabilitas Kinerja Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Melakukan penyusunan rencana strategis perubahan Kemenkumham tahun 2020-2024;
- b. *Coaching* dan mentoring pada setiap bagian terkait capaian kinerja secara berkala;
- c. Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (e-monev, SMART, e-tarja, dan e-Performance);
- d. Monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja dan target kinerja;
- e. Evaluasi kinerja berdasarkan capaian perjanjian kinerja;
- f. Publikasi dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada *website* Kemenkumham;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian BMN;
- h. Penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023;
- i. Monitoring dan evaluasi realisasi anggaran;
- j. Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan).

## E. Area Penguatan Sistem Pengawasan

### 1. Capaian

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah dimana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem telah dilaksanakan :

- a. Telah dilakukan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Telah dibentuk Tim Satgas penyelenggaraan SPIP sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor : W.20.PAS.PAS.6-01.KP.04.01 Tahun 2023 tanggal 9 Januari 2023 tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem;
- c. Telah dibentuk Tim Benturan Kepentingan sesuai Surat Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor : W.20.PAS.PAS.6-91.OT.01.03 Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Nomor W.20.PAS.PAS.6-86.OT.01.03 Tahun 2023 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Tahun 2023;
- d. Telah dilakukan sosialisasi benturan kepentingan;
- e. Telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan.

### 2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Sistem Penguatan Pengawasan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

### 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Penguatan Sistem Pengawasan Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Melakukan penerapan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- b. Laporan pelaksanaan kapabilitas manajemen risiko di lingkungan Kemenkumham;
- c. Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal terhadap Kemenkumham;
- d. Laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit internal terhadap Kemenkumham;
- e. Laporan evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan.

## F. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

### 1. Capaian

Peningkatan kualitas pelayanan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dimana Telah dilakukan:

- a. Telah dilakukan sosialisasi/publikasi 6 komponen *service delivery* dalam dokumen standar pelayanan;
- b. Telah dilakukan publikasi maklumat pelayanan;
- c. Telah dilakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat;
- d. Telah dilakukan penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi E-LAPOR;
- e. Telah dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik;
- f. Telah dilakukan kampanye publik dengan pembuatan bahan-bahan informasi (Website, media sosial, pamflet, brosur, banner, dll).

### 2. Kendala/Hambatan

Dalam pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan B06 Reformasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem Telah dilakukan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan dan tidak mengalami Kendala/Hambatan dalam pelaksanaannya.

### 3. Rencana Aksi untuk Perbaikan

Adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan Tim Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan B09 Reformasi Birokrasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yaitu :

- a. Publikasi hasil survei kepuasan masyarakat;
- b. Laporan internalisasi standar pelayanan;
- c. Dokumen standar pelayanan dan laporan evaluasi;
- d. Laporan publikasi dokumen standar layanan melalui *website*;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi E-LAPOR.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Telah dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem yang dapat diukur salah satunya melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dalam bentuk penyusunan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), rencana aksi perbaikan terhadap 6 (enam) area perubahan beserta data dukung / dokumen terkait serta Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

#### B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar Tim Reformasi Birokrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem dapat melakukan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara berkala dalam rangka menciptakan tata pemerintahan yang baik dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN.
2. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di setiap area perubahan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem perlu menindaklanjuti rencana aksi yang belum dilaksanakan oleh masing masing pokja serta seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem harus memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Karangasem berbasis kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat.

Dibuat di Amlapura  
pada tanggal 22 Juni 2023

Kepala Lapas,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prayitno

NIP.197110241998031002

